

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat setelah Negara China, Negara India dan Amerika Serikat. Permasalahan mengenai kependudukan di Indonesia yang menyebabkan pengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan adalah pola penyebaran penduduk dan juga mobilitas tenaga kerja yang masih kurang seimbang. Hal ini dapat dilihat dari segi antar pulau, daerah perdesaan dan perkotaan, antar sektor, maupun antar daerah (Arsyad, 1999).

Daerah perencanaan atau daerah administrasi merupakan suatu ekonomi yang berada di bawah satu administrasi misalnya satu propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan lain sebagainya. Sedangkan Pembangunan ekonomi daerah yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam membentuk suatu pola kemitraan antara sektor swasta dengan pemerintah daerah, dan juga mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk menciptakan adanya suatu lapangan kerja yang baru serta dapat merangsang berkembangnya pertumbuhan ekonomi di dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

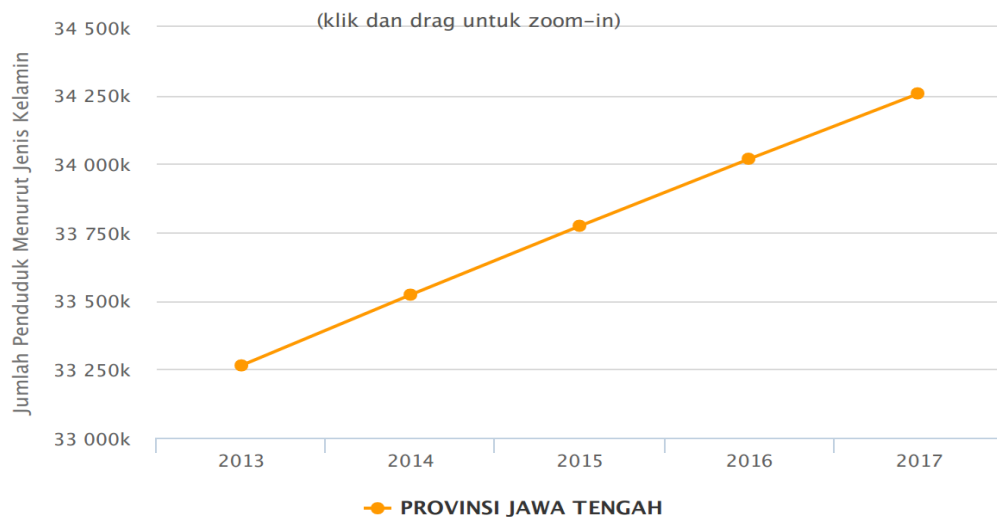
Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang terpenting. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan jumlah angkatan kerja.

Secara tradisional pertumbuhan penduduk dan juga angkatan kerja merupakan faktor yang berpengaruh positif dalam memicu pertumbuhan ekonomi (Indradewa & Natha, 2015).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Jawa Tengah masih memiliki permasalahan ketenagakerjaan yang harus cepat diselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan yang dihadapi antara lain rendahnya perluasan kesempatan kerja, tingginya pengangguran, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, banyaknya pekerja anak, produktivitas kerja yang masih rendah, dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah tantangan yang masih harus dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan adalah salah satunya tentang pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan, karena sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Maka dari itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prasetyawati, 2016).

Pada gambar 1.1 atau gambar grafik dibawah ini menggambarkan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013-2017. Dengan jumlah penduduk 33.250 jiwa pada tahun 2013, dan meningkat menjadi 34.250 pada tahun 2017. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun tentu akan menambah jumlah angkatan kerja. Permasalahan yang terjadi adalah bertambahnya tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan adanya perluasan kesempatan kerja maka akan menimbulkan permasalahan pengangguran. Sedangkan pengangguran sendiri

merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi. Jika permasalahan ketenagakerjaan tidak segera ditangani maka masalah pengangguran juga akan semakin meningkat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa total penduduk usia kerja atau usia 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2016 sebanyak 25,78 juta orang, dan naik 0,29 juta orang dibandingkan keadaan setahun yang lalu (25,49 juta orang).

Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah pada Agustus 2016 mencapai 17,31 juta orang, berkurang 0,60 juta orang dibandingkan dengan angkatan kerja meningkat 0,01 juta orang, dibandingkan angkatan kerja Agustus 2015 sebesar 17,30 juta orang. Pada bulan Agustus 2016, dari seluruh penduduk usia kerja

terdapat sekitar 8,47 juta orang yang termasuk sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau penduduk yang tidak aktif secara ekonomi.

Tabel 1. 1 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak di Jawa
Tengah Tahun Agustus 2013 -Agustus 2016

KEGIATAN		Agt 2013	Agt 2014	Agt 2015	Agt 2016*)
Angkatan Kerja	Bekerja	16.469.960	16.550.682	16.435.142	16.511.136
	Pengangguran	1.054.062	996.344	863.783	801.330
	Total	17.542.022	17.547.026	17.298.925	17.312.466
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	1.526.977	1.949.253	1.976.376	1.866.447
	Mengurus RT	4.436.765	4.361.129	4.896.482	5.240.132
	Lain-lain	1.394.044	1.324.559	1.320.680	1.363.854
	Total	7.357.786	7.634.941	8.193.538	8.470.433
Total Penduduk 15 Tahun ke atas		24.881.808	25.181.967	25.492.463	25.782.899
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		70,43%	69,68%	67,86%	67,15%
Tingkat pengangguran Terbuka		6,01%	5,68%	4,99%	4,63%
Setengah Penganggur		1.485.193	1.185.343	1.071.128	

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

(*): data bersifat sementara

Jumlah ini meningkat sebesar 0,75 juta orang dan naik 0,30 juta dibandingkan keadaan setahun yang lalu sebesar 8,19 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 sebesar 16,51 juta orang, berkurang 0,65 juta orang dan meningkat sebesar 0,07 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2015 (16,44 juta orang) Jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2016 mencapai 0,80 juta orang, atau berkurang 62 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 (0,86 juta orang), dan mengalami penurunan sebesar 0,36 poin dibandingkan TPT Agustus 2015 sebesar 4,99 persen. Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Tengah pada Agustus 2016 tercatat sebesar 67,15 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,72 poin dibandingkan TPAK Agustus 2015 (67,86 persen). Persentase tenaga kerja yang terserap diindikasikan dengan Tingkat Kesempatan Kerja di Jawa Tengah TKK pada bulan Agustus 2016 sebesar 95,37 persen.

Faktor tenaga kerja merupakan faktor yang penting untuk memproduksi barang dan jasa. Banyaknya produksi juga ditentukan oleh banyaknya permintaan dari masyarakat secara keseluruhan. Banyaknya faktor tenaga kerja yang digunakan tentu akan merangsang pertumbuhan ataupun pembangunan ekonomi. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah PDRB, upah minimum, investasi, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Upah Minimum Provinsi/Rata-rata, dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010-2017

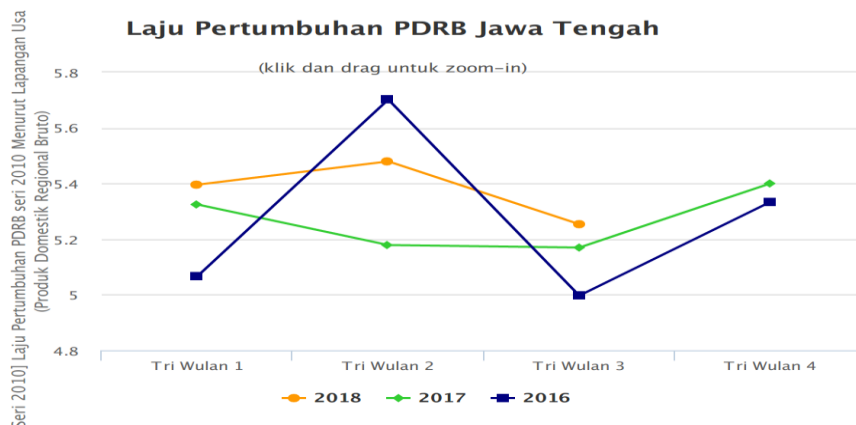
Tahun	PDRB (Rupiah)	UMR (Rupiah)	IPM (Persen)
2010	99.572.441,08	660.000	66,08
2011	110.425.442,74	675.000	66,64
2012	119.706.873,00	765.000	67,21
2013	131.450.708,11	830.000	68,02
2014	140.435.086,55	910.000	68,78
2015	157.201.723,92	910.000	69,49
2016	164.596.657,42	993.000	69,98
2017	167.246.888,46	1.051.000	71,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Tabel di atas memberikan informasi tentang jumlah PDRB, Upah Minimum Provinsi/Rata-rata, serta Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah

periode tahun 2010-2017. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah PDRB di Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Begitu juga dengan Upah Minimum dan juga Indeks pembangunan manusia juga mengalami kenaikan setiap tahun.

Gambar di bawah ini menunjukkan tentang tingkat laju pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah tahun 2016-2018. Grafik di bawah ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan perekonomian suatu daerah atau wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

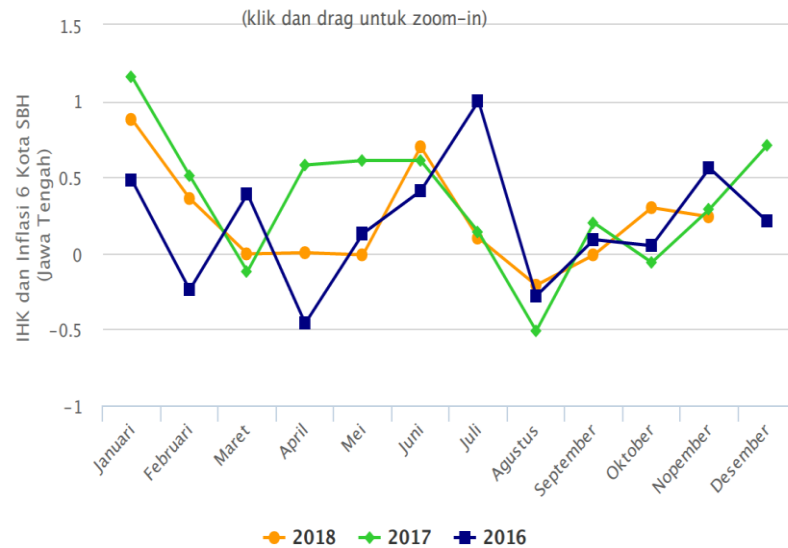
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah

Gambar 1.2 menjelaskan tentang laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2018. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB mengalami fluktuasi antara tahun 2016-2018. Pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu pada

tahun 2016 yaitu sekitar > 5,6 persen (tri wulan pertama), dan terendah pada tahun 2016 yaitu sekitar 5 persen (tri wulan kedua). Naik dan turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Tengah menurut (Simanjuntak, 1998), permintaan tenaga kerja berdasarkan atas kemampuan memproduksi barang dan jasa.

Besar kemampuan kontribusi dari PDRB yang dimiliki seharusnya berdampak dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu sasaran utama dalam proses pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan disisi lain harus dapat menciptakan adanya lapangan pekerjaan baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Maka dari itu pemerintah harus senantiasa membuat kebijakan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan para pekerja dengan tingkat upah yang layak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Syafri & Zulfanetti, 2018) mengenai analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Mereka menyebutkan bahwa salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu melalui PDRB. PDRB sendiri dihitung melalui *value added* atau nilai tambah yang merupakan hasil dari sektor perekonomian di daerah tersebut. Tentu saja pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi membuat perekonomian di Jambi meningkat, dan juga meningkatnya penyerapan tenaga kerja sehingga masalah pengangguran dapat berkurang.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.3 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah Tahun 2016-2018

Gambar 1.3 merupakan grafik dari perkembangan inflasi Jawa Tengah tahun 2015-2018. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari tahun 2017 yaitu angka inflasi mencapai 1,2 persen. Sedangkan inflasi terendah berada pada bulan Agustus tahun 2017 yaitu mencapai titik -0,5 persen.

Inflasi adalah suatu keadaan atau proses dari kenaikan harga yang berlaku di dalam suatu perekonomian. Sedangkan pengertian dari tingkat inflasi adalah presentasi dari kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 1994).

Penelitian yang dilakukan oleh Indradewa dan Natha (2015) mengenai pengaruh Inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di

Provinsi Bali, menunjukkan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali pada periode tahun 1994-2013. Jika tingkat inflasi naik maka akan menyebabkan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja, sedangkan jika tingkat inflasi turun maka yang terjadi adalah meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1.3

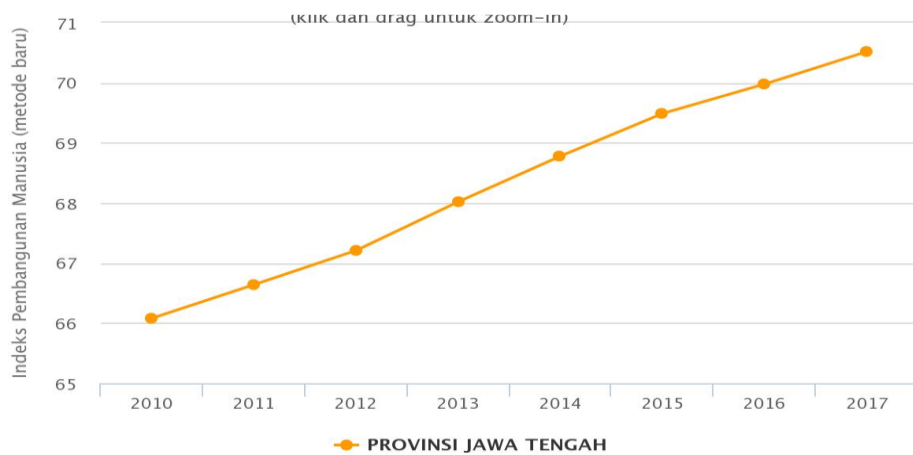
Rata-rata Upah Minimum dan Rata-rata Kebutuhan Hidup Layak di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017

Tahun	KHL	UMR
2010	800 566.11	736 947.84
2011	830 813.09	784 351.99
2012	864 330.28	837 855.60
2013	940 375.03	914 275.68
2014	1 077 793.30	1 066 603.43
2015	1 220 073.32	1 224 532.43
2016	1 416 985.12	1 421 577.11
2017	1 540 000.80	1 547 905.94

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (data diolah)

Tabel 1.3 memberikan informasi mengenai rata-rata upah minimum dan rata-rata Kebutuhan Hidup layak (KHL) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017. Pada tahun 2010 hingga 2014 upah minimum di Jawa Tengah masih berada di bawah angka Kebutuhan Hidup Layak. Sedangkan tahun 2015-2017 upah minimum sudah berada di atas angka kebutuhan Hidup Layak. Upah minimum adalah standar minimum yang digunakan oleh pelaku industri atau para pengusaha untuk memberikan upah kepada para pekerja atas usaha atau kerja di lingkungan kerjanya. Dan pemenuhan kebutuhan layak di setiap provinsi berbeda maka disebut dengan Upah Minimum Provinsi. Penelitian yang dilakukan oleh

Rochmani, Purwaningsih dan Suryantoro (2016) bahwa pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja adalah bernilai positif, itu artinya bahwa kenaikan upah minimum akan menyebabkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan juga sebaliknya. Penurunan tingkat upah minimum akan menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.4 Perkembangan IPM Jawa Tengah tahun 2010-2017

Grafik di atas merupakan grafik dari Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2010-2017. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk dapat melihat kemajuan perkembangan manusia, ada dua aspek yang harus diperhatikan yaitu tentang kecepatan dan juga status pencapaian. Secara general, pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan atau

kemajuan dari periode 2010 sampai 2017. IPM Jawa Tengah mengalami kenaikan di tahun 2010 sebesar 66%, dan naik menjadi di atas 70,12% pada tahun 2017. Dan selama periode tersebut, IPM Jawa Tengah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,56% selama pertahunnya.

Indikator dari Indeks Pembangunan Manusia adalah pendidikan, kesehatan, serta standar hidup manusia (Hakim, 2002). Indeks pembangunan manusia adalah salah satu aspek yang memiliki dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila sumber daya manusia yang ada berkualitas tentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan, sumber daya manusia yang bagus dapat dilakukan dengan melakukan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

Maka dari fenomena di atas, peneliti ingin mencoba mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Karena peneliti berasumsi bahwa penyerapan tenaga merupakan faktor yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi. Sehingga permasalahan penyerapan tenaga kerja harus mendapat perhatian dari pemerintah agar tercipta pembangunan ekonomi yang stabil. Jika jumlah penyerapan tenaga kerja tinggi maka akan mengurangi jumlah pengangguran yang berada di wilayah tersebut. Sehingga peneliti memberi judul penelitian ini dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode Tahun 2010-2017)*”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi variabel-variabel yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk variabel dependen (Y) adalah penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah periode tahun 2010-2017.
2. Untuk variabel independen adalah PDRB (X1), UMK (X2), dan Inflasi (X3), dan IPM (X4) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017.
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap penyerapan tenaga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017.
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017.
4. Bagaimana pengaruh IPM terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis untuk menyelesaikan rumusan masalah tersebut adalah :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat menerapkan atau mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan yang

telah ditempuh, sehingga penulis dapat membandingkan antara teori yang diterima dengan praktik secara langsung di lapangan.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas terkait lainnya di Provinsi Jawa Tengah agar lebih memperhatikan perluasan kesempatan kerja diberbagai sektor agar dapat menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah demi kelancaran pembangunan ekonomi.

3. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber referensi bagi pembaca maupun peneliti lainnya yang akan meneliti pada bidang yang sama, dan dapat memberikan informasi atau menambah pengetahuan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017. Kemudian penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.